



MASA KRISIS PERKEBUNAN TEBU DAN INDUSTRI GULA DI WILAYAH GERBANG KERTASUSILA PASKA PEMERINTAHAN SOEHARTO (1998-SEKARANG)

Artono¹, Hananto Widodo², Arinto Nugroho³

^{1,2,3} Universitas Negeri Surabaya

artono@unesa.ac.id, hanantowidodo@unesa.ac.id, arintonugroho@unesa.ac.id

ABSTRACT

East Java was originally a sugarcane plantation and the main sugar producer in Indonesia. This inability is caused by the decreasing land for planting sugarcane, especially in Java. Since the 19th century, the islands of Java and Sumatra have been among the largest sugar producers. The largest land area is on the island of Java. The quality of the soil and climate are very good for sugar plants. The problem is land conversion. Land conversion occurs due to the development of large cities and their satellite cities. The development of these cities requires land for residential and factory functions. This is actually not a problem as long as there is careful planning and strict implementation of the spatial planning of the area. This study tries to examine the synergy between sugarcane plantations and spatial planning and its implementation. By examining the case of the closure of three sugar factories in Sidoarjo Regency, the study shows that inconsistency in maintaining planting land has resulted in sugar factories experiencing difficulties in sugarcane supply.

Keyword : Period of Crisis, Sugarcane Plantation, Sugar Industry, Gerbang Kertasusila, Post Soeharto Government

ABSTRAK

Jawa Timur semula merupakan perkebunan tebu dan penghasil gula yang utama di Indonesia. Ketidakmampuan ini disebabkan karena lahan tanam menghasilkan tebu semakin berkurang, khususnya di Jawa. Dari abad ke-19 pulau Jawa dan Sumatera merupakan salah satu produsen gula terbesar. Luas lahan yang terbesar ada di pulau Jawa. Kualitas tanah dan iklimnya sangat baik bagi tanaman gula. Persoalannya adalah alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan terjadi karena perkembangan kota-kota besar berikut kota-kota satelitnya. Perkembangan kota ini memerlukan lahan untuk fungsi permukiman dan pabrik. Hal itu sebenarnya tidak ada masalah sepanjang ada perencanaan yang matang dan implementasi yang ketat terhadap tata ruang wilayahnya. Penelitian ini mencoba mencermati sinergitas perkebunan tebu dan perencanaan tata ruang wilayah dan implementasinya. Dengan mencermati kasus penutupan tiga pabrik gula di Kab. Sidoarjo, penelitian menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan menjaga lahan tanam mengakibatkan pabrik gula mengalami kesulitan pasokan tebu.

Kata Kunci: Masa krisis, Pekerbunan tebu, industri gula, Gerbang Kertasusila, Paska Pemerintahan Soeharto

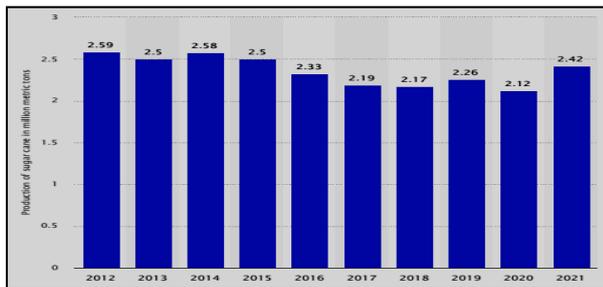
PENDAHULUAN

Produksi tebu di Indonesia paska pemerintahan Soeharto, khususnya sepuluh tahun terakhir, mengalami fluktuasi yang tajam. Gambar 1 menunjukkan bahwa terjadi penurunan produksi mulai tahun 2021 dari 2,59 juta ton menurun hingga 2,12 juta ton pada tahun 2020 dan kemudian meningkat menjadi 2,42 juta ton pada tahun 2021. [1] Meskipun demikian, produksi ini tidak mencukupi kebutuhan nasional. Kebutuhan nasional gula tebu telah mencapai 6,2 juta ton. [2] Akibatnya, Indonesia menjadi salah satu

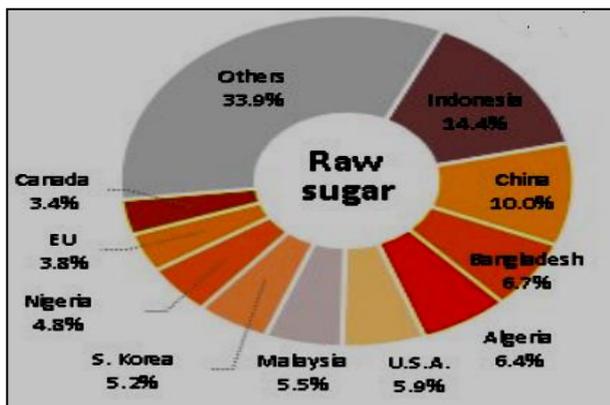
pengimpor gula tebu terbesar di dunia. Indonesia mengimpor 14,4% produk gula mentah di dunia pada tahun 2019.[3] Kondisi ini harus dibayar dengan harga gula yang tinggi di pasaran.

Terlepas dari kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan, tidak semua propinsi di Indonesia memiliki perkebunan tebu. Ada 10 dari 34 propinsi yang memiliki perkebunan tebu. Di Sumatera, ada tiga propinsi yang memiliki perkebunan tebu, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung. Di Jawa ada empat provinsi sebagai produsen tebu, yaitu: Jawa Barat, DI

Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Pulau Sulawesi, ada dua propinsi yang menjadi sentra produksi tebu, yaitu: Gorontalo dan Sulawesi Selatan. Propinsi terakhir adalah Nusa Tenggara Barat. [4], [5] Dari kesepuluh propinsi, produksi tebu terbesar berada di Jawa Timur. Gambar 1 Produksi tebu 2012-2021 [1] dan Kedudukan Indonesia sebagai Pengimpor [3] Produksi tebu di Jawa Timur berada di wilayah pesisir dan pedalaman.



Bagan 2 Produksi tebu tahun 2012-2021



Bagan 1 Kedudukan Indonesia sebagai Pengimpor [3] Produksi tebu di Jawa Timur berada di wilayah pesisir dan pedalaman

Pengusahaan perkebunan tebu ini sebenarnya telah berlangsung lama, yaitu: sejak masa kolonial Belanda. Perkebunan tebu tidak saja dimiliki rakyat, tetapi dikelola oleh pihak swasta akibat liberalisasi ekonomi. Pihak swasta juga membangun sejumlah pabrik gula di wilayah sentra perkebunan tebu. seorang saudagar Oei Tiong Ham yang bertempat tinggal di Semarang menjadi salah satu konglomerat se-Asia pada masanya. Usaha pabrik gula diruntuhkan oleh Soekarno dalam program nasionalisasi perusahaan asing pada tahun 1958.[6]–[8] Salah satu pabrik gula milik Oei Tiong Ham yang dinasionalisasi pemerintah di wilayah Gerbang Kertasusila adalah Pabrik Gula Tanggulangin (Sidoarjo)

dan Pabrik Gula Ponen (Jombang). Pabrik Gula Tanggulangin beralih menjadi pabrik benang dan tekstil dan akhirnya ditutup pada masa krisis moneter (1999). [9], [10]

Kehadiran pabrik gula dan perkebunan tebu ini nampaknya menjadi bagian dari cerita rakyat Surabaya dan sekitarnya. Kisah Sarip Tambakoso (Sidoarjo) dan Cak Sakera (Pasuruan) menggambarkan bagaimana perlawanan tokoh rakyat kecil terhadap “penindasan” pemerintah kolonial Belanda dalam konteks penanaman tebu. Pemaksaan penanaman tebu untuk industri gula dilakukan pemerintah kolonial sebagai pengganti terhadap pajak tanah. Hal ini terjadi terutama dalam masa tanam paksa (*culturstesel*) dan berlanjut pada wilayah-wilayah tertentu dengan mengganti hubungan pekerja dan pabrik menjadi kontraktual. Tindakan yang kejam dari para mandor mendapat respon seperti yang dilakukan cak Sakera dan Sarip Tambakoso.[11]

Sejarah masa lalu menunjukkan bahwa penanaman tebu telah menjadi bagian dari struktur ekonomi masyarakat Jawa Timur. Hal ini juga dibuktikan bahwa luas lahan yang terbesar di Indonesia adalah propinsi Jawa Timur (lihat tabel 1). Namun demikian, menjadi perhatian yang cukup serius karena pada kenyataannya luas lahan tersebut sebenarnya telah jauh berkurang dibandingkan kondisi pada tahun 1950-an. Alih fungsi lahan menjadi permukiman, pusat industri dan pusat perdagangan sebagai penanda pertumbuhan kota di wilayah pesisir Jawa Timur menjadi salah satu penyebabnya. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan Perda No. 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Di dalam RTRW, masyarakat Jawa Timur bersepakat mengembangkan wilayah-wilayah tertentu dengan perkhususannya. Ada 21 kabupaten dikhususkan untuk pengembangan tanaman semusim tebu, antara lain: Lamongan, Gresik dan Sidoarjo dan Jombang, serta Bangkalan dan Sampang untuk wilayah Gerbangkerta-susila.[12]

Di dalam perencanaan pembangunan, pengembangan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan salah hal yang pokok menunjukkan arah pembangunan suatu

wilayah. Ruang merupakan wilayah di mana aktivitas pembangunan dilakukan. Pembangunan yang terencana ruang itu telah dipilah-pilahkan berdasarkan fungsinya. Fakta sejarah telah menunjukkan ketidakadaan perencanaan mengakibatkan wilayah memperoleh berat dari berbagai aktivitas. Beban berat terjadi karena fungsi yang majemuk menjadi daya tarik bagi para pendatang. Urbanisasi meningkat dengan drastis. Jumlah penduduk yang besar tidak diimbangi oleh akselerasi ketersediaan lapangan pekerjaan, perumahan dan berbagai sarana-prasana lainnya, sehingga mengakibatkan ekologi menjadi rusak, antara lain: pertumbuhan kampung kumuh hingga angka kejahatan yang meningkat. Di pihak lain, mengikuti dorongan alamiahnya, fungsi-fungsi yang tidak dapat diatasi wilayah tersebut bergeser ke wilayah-wilayah di sekitarnya. Ketika kebutuhan perumahan dan ketersediaan lahan industri meningkat, wilayah pertanian di pinggiran kota beralih fungsi ke perumahan dan industri.

Di dalam sejumlah penelitian tentang dinamika pertanian dan perkebunan, kebijakan perencanaan tata ruang wilayah dan implementasinya selalu diabaikan sebagai faktor penyebab penurunan luas lahan penanaman. Peneliti lebih mencermati bahwa nilai tukar petani yang rendah mengakibatkan perpindahan profesi ke sektor non-pertanian atau perkebunan. Di dalam kasus perkebunan tebu, khususnya petani tebu rakyat, nilai kontrak sewa tanah atau nilai jual rendemen tebu yang rendah menjadi salah satu faktor utama mengapa petani tidak mau menanam tebu. Karena terjadi penurunan produksi tebu, pabrik gula mengalami kurang pasokan bahan baku dan akhirnya memilih membeli gula mentah dan mengolah menjadi gula pasir siap jual. Penelitian ini mencermati tentang bagaimana kebijakan perencanaan tata ruang wilayah dan implementasinya sebagai indikator dari kebijakan pembangunan pertanian/perkebunan di wilayahnya. Di pihak lain, melalui kebijakan ini, penelitian mencermati alih fungsi lahan dan konsekuensinya terhadap penurunan produktivitas tebu, serta kesulitan industri gula. Hal ini dapat dicermati pada kasus penutupan tiga pabrik gula di Kab.

Sidoarjo. Pabrik Gula Krian ditutup pada tahun 1994 dan dua puluh tahun berikutnya, tepatnya tahun 2018 dua pabrik ditutup, yaitu: PG Toelangan dan PG Watoetoelis. Ketiga penutupan pabrik gula dapat dijadikan penanda krisis produksi gula di Jawa Timur. Oleh karena itu, ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab, yaitu tentang perkembangan perkebunan tebu di wilayah tersebut dan bagaimana implementasi Perda Jawa Timur No. 5 tahun 2012 sebagai upaya mempertahankan ketersediaan lahan perkebunan dan pertanian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang menggunakan pendekatan heuristik dan memadukan dengan sejumlah metode penelitian ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi perdesaan dan ilmu politik (administrasi perkotaan). Sejarah bukan saja merupakan ilmu yang mempelajari peristiwa lampau sebelum penulis hidup dan bersifat *discontinuity*, melainkan melalui sejarah peristiwa dilihat sebagai rangkaian kejadian yang berkelanjutan. Pemaknaan menjadi sangat penting untuk memprediksi atau mengambil kebijakan yang lebih arif. Oleh karena itu, Sartono Kartodirjo menyarankan untuk menggunakan berbagai perspektif ilmu-ilmu sosial, mulai dari konsep hingga metode agar lebih komprehensif dan heuristik.

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, data sekunder berupa arsip perundang-undangan hingga data BPS yang memuat tentang perkembangan produksi tebu, pabrik gula hingga kontrak-kontrak terkait dengan penanaman tebu di lahan pertanian. Kedua, data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah, BPN, Manajemen Pabrik Gula dan Masyarakat.

Data pertama dilakukan dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi atau perekaman data dapat diperoleh melalui situs-situs di internet maupun mendatangi langsung. Sementara itu, data kedua diperoleh melakukan wawancara dengan pihak yang terkait. Pihak yang terkait pada gilirannya juga memberikan data.

Setelah data dikumpulkan, tim peneliti melakukan verifikasi atas data yang diperoleh. Data dicek validitasnya, mulai dari asal usul sumber dan melakukan triangulasi dengan data sejenis lainnya. Langkah kedua adalah interpretasi terhadap data yang diperoleh. Ketiga, melakukan rekonstruksi atas peristiwa dalam hal ini adalah produksi tebu dan lahan tebu, serta motif orang tidak memanfaatkan lahan untuk penanaman tebu, serta alih fungsi yang telah dilakukan.

PEMBAHASAN

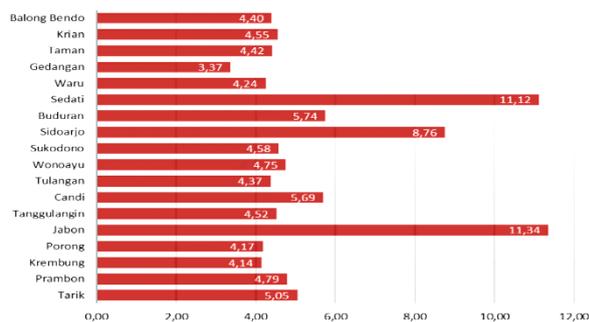
1. Kabupaten Sidoarjo sebagai Penyangga Kota Metropolitan

Di dalam situs resminya, Kabupaten ini berada persis berbatasan dengan Kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan ibukota propinsi Jawa Timur. Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk mendekati tiga juta jiwa, tepatnya 2.970.843 jiwa dengan angka kepadatan 8.875 jiwa/km². Sebagai kota metropolitan, Kota Surabaya telah berhasil beralih dari sektor pertanian ke setkor industri. Perkembangan kota Surabaya ini dimulai pada awal abad ke-19. Pemerintah kolonial paska VOC telah mengembangkan Surabaya tidak saja sebagai industri pertahanan *constructie winkel* (1808) di bawah F.J. Rothenbuhler (1799- 1808) menjabat *gezaghebber* dan Willem Daendels sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda. Perkembangan industri berlanjut dengan berbagai produk. Perkebunan dan diikuti pembangunan industri gula juga terjadi kota Soerabaya hingga terus menyebar ke kabupaten Sidoarjo. Hal itu terutama masa Tanam Paksa (1830-1870). Dataran rendah di sepanjang Surabaya dan sekitarnya menjadi lahan tebu. Pabrik-pabrik tebu berkembang tidak saja di Surabaya (di sepanjang Sungai Ngangel) dan terus meluas hingga ke Sidoarjo. Sejumlah pabrik Tebu berdiri di wilayah Sidoarjo, seperti: Buduran, Waru, Karangbong, Ketegan (1835), Watoetoelis, Balongbendo, Gedek, dan Sranten (1839) dan Sruni (1940). Perkembangan perkebunan tebu dan industri gula ini berdampak pada perkembangan Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Staatsblad No.6 (31 Januari 1859) pemerintah kolonial Belanda memutuskan

wilayah Sidoarjo terpisah dengan Kabupaten Surabaya dengan nama Kabupaten Sidokare.

Kabupaten Sidoarjo sebenarnya telah pusat pemerintahan pada masa pra-kolonial Belanda, terutama paska pemerintah Airlangga. Pada masa itu Kabupaten ini bernama pusat Kerajaan Jenggala (1042-1135 M). Sementara itu, Surabaya masih merupakan pusat pelabuhan Hujung Galuh bagian dari kerajaan tersebut, termasuk wilayah Kabupaten Pasuruan. Kondisi menjadi berbalik ketika pada masa kolonial Belanda. Dengan akses pelabuhannya, Kota Surabaya menjadi pesat sebagai kota industri dan perdagangan, sedangkan Kabupaten Sidoarjo menjadi daerah pertanian. Meskipun demikian, dengan perkembangan industri Kota Surabaya hingga pada masa pemerintahan Surabaya, Kabupaten Sidoarjo mengalami imbas yang kuat. Pertama, sebageian wilayahnya, terutama di wilayah perbatasan, seperti Kecamatan Waru, Kecamatan Sepanjang hingga Kecamatan Krian tumbuh menjadi pusat Industri. Kedua, terjadi kenaikan pembangunan perumahan di Kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan Kota Surabaya, seperti Kec.Taman, Kec. Waru dan Kec. Sedati. Perumahan-perumahan di Kec. Taman misalnya Sepanjang Town, Taman Pondok Jati, Sukoasri dan Kedungturi Permai. Sementara itu, Kec. Waru merupakan perluasan wilayah industri Surabaya dengan Pabrik Susu Nestle, Pabrik Paku dan Kantor Gudang Garam, dan terdapat terminal bis Purabaya yang menghubungkan antara Kota Surabaya (dan Kab. Sidoarjo) dan kota-kota di dalam antara luar provinsi Jawa Timur. Kec. Sedati bagian Utara berbatasan dengan Kec. Rungkut. Sejumlah perumahan dibangun hingga mendekati Bandara Juanda. Luas Kabupaten Sidoarjo adalah 714,24 km² dengan kecamatan Jabon yang terluas, yaitu 81 km² atau 11,34%. Kecamatan terluas kedua adalah Kec. Sedati dengan 11,2 5 atau 79,43 km.² Jumlah penduduknya adalah 2.033.764 jiwa dengan tingkat kepadatan 2.847 jiwa/km.² Sama seperti penduduk di sekitar kota Surabaya, sebagian dari mereka bekerja di Surabaya. Pada waktu pagi sekitar pukul 7 pagi, jalan penghubung antara kota Surabaya dan kota-kota di sektiarnya, seperti Jalan Raya

Achmad Yani (Surabaya)-Waru-Gedangan-Buduran-Sidoarjo, terutama di depan Markas Marinir hingga Bundaran Aloha, dan Krian-Taman-Achmad Yani (Surabaya) mengalami kepadatan yang luar biasa. Hal itu terjadi juga di Jalan Raya Gresik-Surabaya hingga Demak dan Pasar Turi. Sebagian besar mereka mengendarai sepeda motor. Sebagian kendaraan beroda empat memilih menggunakan jalan tol, meski mengalami kemacetan juga, meski tidak terlalu parah.



Bagan 3 Persentase luas kecamatan-kecamatan di Sidoarjo

2. Struktur Ekonomi Masyarakat Sidoarjo

Alih fungsi lahan di Kecamatan Sedati sebenarnya patut disesalkan. Sebelum tahun 1990-an, Kecamatan ini terkenal dengan produksi padinya, yaitu Beras Sedati. Pembangunan perumahan telah mengurangi luas areal persawahan dan produksi padi. Pada masa yang sama, penurunan areal persawahan ini diikuti oleh penurunan areal perkebunan, termasuk perkebunan tebu rakyat. Selain persawahan, luas tambak/ kolam juga berkurang, meski tidak sebesar apa yang terjadi pada persawahan. Tambak/kolam ini terdapat di bagian Utara Kabupaten Sidoarjo. Daerah tersebut persis di sepanjang garis pantai Kabupaten Surabaya. Kejadian yang demikian ini sebenarnya dialami oleh kecamatan-kecamatan lainnya.

Bila memperhatikan tabel 1, maka prosentase penggunaan lebih terkonsentrasi pada sektor pertanian, termasuk tegal/ladang dan perikanan air payau, yaitu berkisar 55,29%. Sementara itu, luas permukiman telah mencapai 32,43% atau 23.470,3095 ha. Pembangunan permukiman ini tidak jarang menggunakan lahan persawahan yang subur.

Saluran irigasi berubah menjadi saluran pematusan. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi dari kebutuhan papan yang cukup tinggi pada masyarakat urban sekitar Kota Surabaya. Mereka tidak bisa membeli tanah atau rumah di Kota Surabaya karena harga yang mahal.

Tabel 1 Penggunaan Lahan Kab. Sidoarjo tahun 2020

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Prosentase
Tegal/Ladang	1.801,6397	2,49
Sawah Irigasi	19.467,1268	26,90
Tambak/Kolam	18.649,7719	25,77
Perkebunan	1.870,3011	2,58
Sungai	1.134,7084	1,57
Lumpur	681,2581	0,94
Bakau	1.022,9866	1,41
Industri	3.294,9706	4,55
Permukiman	23.470,3095	32,43
Fasilitas Umum	172,9506	0,24
Bandara	545,4893	0,75
Ruang Terbuka Hijau	257,2776	0,36
Keseluruhan	72,368,7902	

Kenyataan di atas menjadi berbeda bila melihat dari PDRB (Product Domestic Regional Bruto). Struktur ekonomi masyarakat Kabupaten Sidoarjo sebenarnya bergeser jauh ke arah sektor industri. Sejumlah perusahaan besar telah meluas dari pinggiran kota Surabaya ke wilayah Kab. Sidoarjo hingga perbatasan Kabupaten Mojokerto, antara PT Kiwi Kimia, Pakerin, dan menjadi pusat dari PT Maspion. Pembangunan industri itu memberikan konsekuensi perubahan struktur pekerjaan masyarakat desa ke arah industri di satu pihak, atau mengembangkan sektor-sektor pendukung dari industri, seperti rumah kos, usaha makanan dan minuman, dan jasa akomodasi lainnya. Perkembangan industri ini juga memasuki wilayah pertanian dalam skala menengah, kecil dan mikro yang melengkapi kebutuhan industri besar, atau kebutuhan sektor lainnya, seperti bengkel untuk jasa transportasi dan peng-angkutan.

Gambaran yang menarik dapat dilihat ketika membandingkan distribusi prosentase PDRB berdasarkan harga berlaku dan harga konstan.

Tabel 2 Distribusi Presentase PDRB Kab. Sidoarjo Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	Dasar Harga Berlaku					Dasar Harga Konstan				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,39	2,33	2,17	2,07	2,25	3,78	1,93	-3,87	0,26	2,75
Pertambangan dan Penggalian	0,09	0,09	0,1	0,09	0,06	5,24	3,07	2,08	1,69	-29,7
Industri pengolahan	46,00	46,11	46,72	47,86	51,17	4,52	5,7	7,11	8,89	0,98
Pengadaan Listrik dan gas	1,08	1,03	0,91	0,85	0,85	-1,88	2,22	-6,44	-0,78	0,98
Pengadaan air, Pengolaan Sampah, limbah dan daur	0,07	0,06	0,06	0,06	0,7	0,07	0,08	0,06	0,06	0,07
Konstruksi	9,14	9,19	9,05	8,68	8,68	9,14	9,19	9,05	8,68	8,68
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	16,01	16,1	16,24	16,29	16,02	16,01	16,1	16,24	16,29	16,92
Transportasi dan Pergudangan	12,26	12,21	11,97	11,24	7,4	12,26	12,21	11,97	11,24	7,4
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,41	3,45	3,43	3,49	3,41	3,41	3,45	3,42	3,46	3,41
Informasi dan Komunikasi	3,49	3,59	3,42	3,46	3,86	3,49	3,5	3,42	3,46	3,86
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,28	1,25	1,23	1,2	1,24	1,28	1,25	3,23	1,2	1,,24
Real Estat	0,91	0,9	0,91	0,92	0,99	0,91	0,9	0,91	0,92	0,99
Jasa Perusahaan	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,19	0,16	0,16	0,16	0,16
Administasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1,84	1,79	1,82	1,82	1,93	1,84	1,79	1,82	1,82	1,93
Jasa Pendidikan	1,2	1,16	1,14	1,16	1,25	1,2	1,16	1,14	1,16	1,25
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,31	0,31	0,3	0,3	0,34	0,31	0,31	0,3	0,3	0,34
Jasa Lainnya	0,36	0,35	0,35	0,35	31	0,36	0,35	0,35	0,35	0,31

Mencermati tabel 2, ada tahun dan sektor yang menarik untuk dibahas. PDRB tahun 2020 telah menunjukkan penurunan laju pertumbuhan, bahkan ada yang berada di bawah angka 0, yaitu sektor pertambangan dan penggalian. Karena masa pandemi COVID-19, sektor ini praktis berhenti beraktivitas. Hal yang sama terjadi pada sektor industri pengolahan. Kebijakan pemerintah untuk pembatasan pergerakan manusia mengakibatkan perusahaan untuk menghentikan atau meminimalisir aktivitas

pekerjanya. Ada sebagian yang mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), sebagian lainnya di-rumah-kan sementara, dan ada pula yang mengalami pengaturan kerja berikut pendapatannya. Ketika hampir semua sektor terkoreksi, justru sektor pertanian dan sejenisnya mengalami kenaikan yang signifikan. Artinya, ada peralihan aktivitas sejumlah sektor tersebut. Sektor pertanian dan sejenisnya menjadi katup penyelamat di tengah krisis Pandemi COVID-19.

Tabel 3 Tabel pertumbuhan PDRB kabupaten dan kota di Jawa Timur berdasarkan harga konstan 2010

No.	Kabupaten/kota	2016	2017	2018	2019	2020
A. Kabupaten/Regency						
1	Pacitan	5,21	4,98	5,51	5,08	-1,84
2	Ponorogo	5,29	5,1	5,31	5,01	-0,9
3	Trenggalek	5	5,02	5,03	5,08	-2,17
4	Tulungagung	5,02	5,08	5,21	5,32	-3,09
5	Blitar	5,08	5,07	5,1	5,12	-2,29
6	Kediri	5,02	4,9	5,08	5,07	-2,41
7	Malang	5,3	5,43	5,56	5,5	-2,68
8	Lumajang	4,7	5,05	5,02	4,77	-2,79
9	Jember	5,23	5,11	5,23	5,31	-2,98
10	Banyuwangi	5,38	5,45	5,84	5,55	-3,58
11	Bondowoso	4,97	5,03	5,1	5,29	-1,36
12	Situbondo	5	5,07	5,47	5,45	-2,33
13	Probolinggo	4,77	4,46	4,47	4,56	-2,12
14	Pasuruan	5,44	5,72	5,79	5,83	-2,03
15	Sidoarjo	5,51	5,8	6,02	5,99	-3,69
16	Mojokerto	5,49	5,73	5,88	5,81	-1,11
17	Jombang	5,4	5,36	5,44	5,06	-1,98
18	Nganjuk	5,29	5,26	5,38	5,36	-1,71
19	Madiun	5,27	5,42	5,1	5,42	-1,69
20	Magetan	5,31	5,09	5,22	5,04	-1,64
21	Ngawi	5,21	5,07	5,21	5,05	-1,69
22	Bojonegoro	21,95	10,25	4,4	6,34	-0,4
23	Tuban	4,9	4,98	5,17	5,14	-5,85
24	Lamongan	5,86	5,5	5,45	5,44	-2,65
25	Gresik	5,49	5,83	5,97	5,41	-3,68
26	Bangkalan	0,66	3,53	4,22	1,03	-5,59
27	Sampang	6,17	4,69	4,56	1,42	-0,29
28	Pamekasan	5,35	5,04	5,46	4,92	-2,54
29	Sumenep	2,58	2,86	3,63	0,14	-1,13
B. Kota/Municipality						
1	Kediri	5,54	5,14	5,43	5,47	-6,25
2	Blitar	5,76	5,78	5,83	5,84	-2,28
3	Malang	5,61	5,69	5,72	5,73	-2,26
4	Probolinggo	5,88	5,88	5,94	5,94	-3,64
5	Pasuruan	5,46	5,47	5,54	5,56	-4,33
6	Mojokerto	5,77	5,65	5,8	5,75	-3,69
7	Madiun	5,9	5,93	5,96	5,69	-3,39
8	Surabaya	6	6,13	6,2	6,1	-4,85
9	Batu	6,61	6,56	6,5	6,52	-6,46
Jawa Timur		5,57	5,46	5,5	5,52	-2,39

Tabel 3 menggambarkan proses dinamika yang tidak berbeda jauh antar kabupaten/kota di Jawa Timur. Pada wilayah-wilayah perkotaan yang mengandalkan sektor di luar non-pertanian/perkebunan/perikanan, laju pertumbuhannya mengalami koreksi penurunan yang signifikan. Koreksi tersebut ditambah dengan imbas yang terjadi pada kota yang menjadi pusat, dan kabupaten itu menjadi penyangganya, seperti Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya. Kota yang mengalami koreksi yang sangat tajam adalah Kota Kediri, Kota Batu dan Kota Surabaya. Kota Kediri

semula mengalami pertumbuhan 5,475 dan menjadi -6,25%, begitu pula dengan Kota Surabaya semula 6,1% menjadi -4,85. Sementara itu, penderitaan lebih besar dialami Kota Batu yang mengandalkan sektor pariwisata berikut akomodasinya, yaitu dari 6,52% (tahun 2019) menjadi -6,46 (tahun 2020).

Analisis sementara dari tabel-tabel ini adalah bahwa terjadi perubahan struktur ekonomi masyarakat Kab. Sidoarjo dari struktur pertanian ke arah industri. Kondisi ini patut diduga mempengaruhi perubahan fungsi

lahan dari pertanian dan perkebunan menjadi industri dan perumahan. Dalam kasus tanaman tebu, kondisi ini berpengaruh pada luas lahan tanam tebu dan panennya

3. Komoditi Gula di Jawa Timur: Bergantung Luas Areal Perkebunan Tebu

Kabupaten Sidoarjo sebenarnya bukanlah merupakan salah satu wilayah yang memiliki areal perkebunan tebu terluas. Dari tabel 4, bila dibandingkan dengan luas wilayahnya, Kab. Sidoarjo hanya 6,41%, jauh lebih kecil dibandingkan Kota dan Kabupaten Mojokerto. Luas areal tanam tebu Kota Mojokerto sebesar 7,17% dan Kabupaten Mojokerto sebesar 11,93%. Kabupaten Kediri memiliki luas lahan terluas hingga mencapai 12,19%. Dari luas lahan riil, kabupaten Malang menduduki lahan tebu terluas dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten terluas di Jawa Timur menggunakan 353.065 ha untuk perkebunan tebu rakyat. Tebu ditanam di wilayah dataran rendah hingga ke lereng gunung di bagian Selatan hingga ke Pantai Selatan, seperti: Kec. Singosari, Kec. Gedangan, dan Kec. Dampit seterusnya hingga Kec. Gondanglegi.

Wilayah-wilayah kabupaten/kota tersebut memang cocok untuk ditanami tebu. Sesuai dengan penciri usia tanaman tebu, luas areal perkebunan tersebut tidak bisa dibedakan berdasarkan lama tanam, sehingga luasnya bertambah. Suatu contoh, pada persawahan beririgasi permanen dan ditunjang pasokan air dan varietas padi, tanaman padi bisa dipanen sebanyak 3 kali dalam setahun. Tebu hanya bisa ditanam sekali dalam setahun di daerah tropis dengan ketinggian sekitar 0 s/d 900 mdpl dan curah hujan rata-rata 2000 mm per tahun. Sementara itu, tebu membutuhkan suhu udara 21 s/d 32⁰ C dan pH tanah 5-6. Sama seperti tanaman padi, tanaman tebu juga membutuhkan air, terutama pada saat-saat awal penanaman. Pada tanam padi, persawahan dibuat tergenang air setelah dibajak, sedangkan tebu lahan dibuat sedemikian rupa, sehingga ada saluran irigasi di dalam lahan dan di luar lahan. Air ini dibutuhkan untuk menyalurkan zat hara. Oleh

karena itu, tidak salah bila pemerintah kolonial Belanda membangun saluran irigasi *Pekalen* di Karesidenan Besuki. Selain untuk peningkatan produksi padi, saluran irigasi tersebut digunakan untuk penanaman tebu. Dengan demikian, bila tanah disewa oleh pabrik gula, maka pemilik tanah harus bersiap-siap untuk memiliki ketersediaan pangan, kecuali diperkerjakan lahan yang disewakan ke pabrik gula.

Kabupaten Sidoarjo dan sekitarnya pada masa kolonial sebenarnya mengembangkan dua komoditi utama, yaitu beras dan gula. Beras merupakan komoditi lama sebelum pra-kolonialisme Belanda. Komoditi ini ditanam sepanjang sungai Berantas, berikut wilayah deltanya (Kab. Sidoarjo). Sementara itu, komoditi gula diperkenalkan pada abad ke-19 sebagai bagian dari proyek Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) pemerintahan Kolonial Belanda. Di dalam kebijakan atau proyek tersebut, gula merupakan salah satu produk ekspor ke Eropa yang luar biasa. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan tanaman tebu dari India dan Amerika Latin. Selumnya, masyarakat Jawa mengkonsumsi gula dari pohon aren, Getah aren yang ditiris di atas pohon atau orang Jawa mengenal dengan istilah *legen*, Air *legen* direbus sedemikian rupa hingga berwarna kecoklatan dan cetak ke dalam tempurung. Gula yang diproduksi dengan sebagai *gula merah* atau *gula jawa*.

Pada masa kolonial Hindia Belanda, Kabupaten Sidoarjo termasuk wilayah Karesidenan Surabaya ini termasuk wilayah penanaman tebu. Tanaman tebu ditanam pada wilayah-wilayah persawahannya dengan sistem sewa. Atau, pada masa sebelum 1870 para petani harus menyerahkan sebagian tanahnya untuk pengganti pajak. Di bagian wilayah dekat pantai, masyarakat membudidayakan tambak, baik garam maupun ikan. Wilayah penanaman tebu sepanjang antara Surabaya dan Sidoarjo, dan antara Surabaya dan Mojokerto. Pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda, pertumbuhan penanaman tebu yang begitu pesat memberikan konsekuensi pembangunan pabrik gula hingga mencapai 20 PG di akhir tahun 1930.

Tabel 4 Areal Tanaman Tebu di Propinsi Jawa Timur 2006-2017

Kabupaten /Kota	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Luas	%
A. Rakyat														
Kabupaten														
01. Pacitan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.992	-
02. Ponorogo	2.458	2.723	2.538	2.466	1.872	2.415	2.740	1.789	1.776	1.618	1.017	1.017	130.570	0,78
03. Trenggalek	659	1.022	1.065	996	597	660	683	698	624	568	336	336	114.722	0,29
04. Tulungagung	2.953	5.716	5.857	5.628	5.971	8.154	8.588	985	5.947	5.417	6.071	5.703	105.565	5,40
05. Blitar	9.563	9.061	9.182	8.645	6.817	6.326	6.438	6.448	6.484	5.906	6.790	6.790	133.648	5,08
06. Kediri	18.896	16.423	17.115	16.834	21.121	23.704	23.725	23.747	26.133	23.805	27.249	26.415	138.605	19,06
07. Malang	27.463	27.348	28.164	27.850	37.352	42.515	41.245	44.317	44.317	40.369	44.318	43.021	353.065	12,19
08. Lumajang	11.473	16.264	16.253	15.189	14.548	12.002	12.370	12.504	12.550	11.432	20.184	19.021	179.090	10,62
09. Jember	3.508	7.720	8.045	7.586	4.928	4.925	4.942	6.495	7.578	6.903	9.517	9.435	309.234	3,05
10. Banyuwangi	3.302	2.634	2.745	2.573	2.648	969	2.872	324	517	471	6.039	5.957	578.240	1,03
11. Bondowoso	4.855	6.324	6.590	6.486	6.486	5.111	5.231	6.449	6.853	6.243	4.341	4.259	152.597	2,79
12. Situbondo	7.214	7.816	8.145	7.086	7.139	8.224	8.236	8.822	8.022	7.307	8.222	8.140	166.987	4,87
13. Probolinggo	3.665	2.620	2.730	2.539	2.649	2.085	2.092	3.662	4.212	3.837	3.815	3.733	169.621	2,20
14. Pasuruan	6.642	5.675	5.714	5.647	3.734	3.700	3.792	3.719	4.286	3.904	4.546	4.464	147.402	3,03
15. Sidoarjo	6.197	6.494	6.568	6.342	6.561	6.797	6.815	6.266	5.691	5.184	4.148	4.066	63.438	6,41
16. Mojokerto	11.619	10.816	10.127	9.967	10.479	12.532	12.008	10.563	8.850	8.062	9.233	8.564	71.783	11,93
17. Jombang	10.100	12.673	12.581	12.185	12.711	11.055	12.248	11.840	11.983	10.916	9.259	8.751	111.509	7,85
18. Nganjuk	4.905	3.947	4.113	3.946	4.177	4.215	3.831	4.131	3.841	3.499	3.201	2.974	122.425	2,43
19. Madiun	5.169	6.245	6.508	5.386	7.939	5.467	5.543	5.547	3.390	3.088	2.892	2.810	103.758	2,71
20. Magetan	5.110	6.597	6.875	6.785	7.229	7.063	7.163	7.862	7.935	7.228	7.543	7.214	68.884	10,47

21. Ngawi	7.102	6.580	6.857	5.682	4.561	5.959	6.075	6.566	6.566	5.981	6.116	6.034	129.598	4,66
22. Bojonegoro	1.245	1.251	1.304	663	691	753	820	1.671	1.886	1.718	1.694	1.612	219.879	0,73
23. Tuban	243	856	892	876	913	716	717	1.609	1.633	1.488	1.641	1.559	183.415	0,85
24. Lamongan	2.856	2.548	2.655	2.524	2.362	2.108	3.003	3.452	3.837	3.495	5.600	5.518	178.205	3,10
25. Gresik	1.504	2.188	2.280	2.158	1.680	1.272	2.191	2.134	2.160	1.968	2.374	2.292	119.125	1,92
26. Bangkalan	-	-	-	-	-	-	131	1.153	1.384	1.261	617	589	100.144	0,59
27. Sampang	-	-	-	-	-	-	260	837	1.423	1.296	1.582	1.582	123.308	1,28
28. Pamekasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.224	-
29. Sumenep	-	-	-	-	-	-	-	-	182	166	195	167	199.854	0,08
Kota														
71. Kediri	1.371	3.355	3.196	2.795	1.168	609	614	614	1.101	1.003	1.085	1.003	6.340	15,82
72. Blitar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.257	
73. Malang	1.378	800	735	468	488	677	680	680	680	619	657	629	14.528	4,33
74. Probolinggo	261	171	178	85	89	82	82	82	58	53	27	-	5.667	-
75. Pasuruan	211	193	201	116	121	24	24	24	24	22	24	-	3.529	-
76. Mojokerto	295	161	168	168	173	174	180	180	180	164	173	145	2.021	7,17
77. Madiun	869	799	733	524	547	157	157	157	157	143	126	98	3.392	2,89
78. Surabaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.054	
79. Batu	-	-	-	-	20	22	22	22	137	125	70	42	13.674	0,31
Sub-Jumlah	163.086	177.020	180.114	170.195	177.771	180.473	185.518	185.349	192.398	175.259	200.702	193.940	4.780.349	4,06
B. PNP/PTP	9.145	19.725	19.725	15.605	15.625	17.289	17.965	20.456	26.308	-	-	-	-	-
C. PBS	1.598	1.598	983	226	-	-	-	-	405	-	-	-	-	-
Jawa Timur	173.829	198.343	200.822	186.026	193.396	197.762	203.483	205.805	218.706	175.259	200.702	193.940		

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

Di tahun 1970-an hingga awal 1990-an sepanjang jalan antara Gedangan, Buduran hingga Sidoarjo masih ada tanaman tebu, begitu pula antara Waru hingga Krian, dan Krian hingga Mojosari. Perubahan berangsur-angsur, tetapi pasti beralih ke arah industri dan perumahan. Di wilayah Gedangan dan sekitarnya, PT Maspion membangun kompleks industri, begitu pula industri-industri lain mulai dari Gedangan hingga Surabaya. Selain PT Maspion, ada perusahaan susu Nestle di Waru yang akhirnya pindah ke Purwoasri, Malang (tahun 2000), perusahaan pakan ternak dan seterusnya sepanjang jalan menuju Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo. Selain itu, berbagai perumahan berkembang pesat, antara lain: Perumahan Deltasari di Aloha. Sementara itu, pembangunan pabrik dan perumahan terjadi juga di sepanjang jalan menuju Kab. Mojokerto, antara lain: Pabrik Pakan Ternak dan Pabrik Kaca Asahi Mas di sekitar jembatan layang Trosobo, Pabrik Pakan Ternak Pokphan dan Pabrik Kopi di Krian, serta Pabrik Kertas PT Tjiwi Kimia Paper Factory Tbk yang telah beroperasi sejak tahun 1978. Pertumbuhan pabrik yang berskala menengah dan besar terjadi juga di wilayah Tulangan, Wonoayu dan Prambon, padahal apabila tidak dialihfungsikan, tebu tersebut digunakan untuk tiga pabrik gula, yaitu: PG Toelangan, PG Watoetulis dan PG Krian.

Penurunan produksi tebu ini bisa diperhatikan pada tabel 5.5, dari 38.342 ton (tahun 2006) menjadi 22.713 ton (2017). Oleh karena itu, bisa dipahami kebijakan PTP untuk menutup ketiga pabrik gula tersebut. Apabila tidak demikian, produksi gula yang dihasilkan sangat tidak efisien. Mereka hanya berharap dari pasokan luar wilayah. Artinya, mereka harus membeli tebu dari wilayah Mojokerto, Jombang dan Lamongan. *“Dulu, truk saya disewakan untuk masuk tebu dari Jombang ke PG Watoetulis. Kalau dari tebu wilayah Prambon, bisa dua tiga rit, tapi dari Jombang hanya satu rit.... Sekarang, karena PG tutup, saya saya cari-cari angkutan.. ya lebih susah... Nggak pasti... Kadang-kadang dapet,*

kadang-kadang zonk” ujar Cak Kasan, sopir jasa angkut (58 tahun, Krian).

4. Ketidakpatuhan atau Ketidakadaan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)

Bila mengikuti pendapat Clifford Geertz, penempatan proyek penanaman tanaman produk ekspor di Jawa oleh pemerintah Hindia Belanda sudah tepat. Secara ekologi, Geertz membedakan Indonesia dalam dan Indonesia luar. Wilayah Indonesia dalam adalah Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut merupakan lahan yang subur dengan sistem pertanian sawah, sementara di luar kedua pulau itu masih berada di dalam sistem perekonomian pemburu, perami, petani peladang. Di sisi lain, pulau Jawa secara geopolitik sangat tepat dalam perdagangan internasional (*jalur sutra*). Oleh karena itu, pemerintah kolonial Hindia Belanda memindahkan pusat kekuasaannya di Pulau Jawa di satu pihak. Di pihak lain, pemerintah Hindia Belanda dengan segera melakukan eksploitasi atau sejenisnya dengan meningkatkan ekspor ke Eropa dengan mengenalkan dan memaksa penduduk menanam tanaman ekspor, seperti: gula, kopi dan teh. Melalui proyek *Cultuurstelsel*, petani menanamnya sebagai ganti pajak tanah. Pada akhirnya proyek ini dihentikan karena mengakibatkan kesengsaraan rakyat akibat eksploitasi yang berlebihan, tidak sesuai kesepakatan sesuai aturan dalam *Cultuurstelsel* dan digantikan dengan sistem liberalisasi ekonomi paska *Agrarische Wet (1870)*.

Dengan sistem liberalisasi ekonomi, perusahaan perkebunan swasta (*onderneming*) memperluas lahan perkebunan. Mereka menyewa tanah pada pemerintah kolonial Belanda dan pada penduduk pribumi. Sementara itu, baik perusahaan swasta maupun pemerintah Hindia Belanda membangun infrastruktur dan industri penyokong produk perkebunan. Untuk tanaman tebu, pabrik-pabrik gula didirikan di sekitar wilayah penanaman tebu, termasuk di Karesidenan

Surabaya dengan Sidoarjo di dalamnya, begitu pula dengan lori-lori pengangkut tebu hingga ke pabrik gula. Selain lori, ada juga kereta api hingga ke wilayah pedalaman Jawa Timur. Kereta api ini mengangkut produk olahan ke pelabuhan. Pertumbuhan kota pun semakin pesat dan sebagai konsekuensinya wilayah pertanian pun tergusur. Seolah-olah sejarah terus berulang dan berlanjut, proses alih fungsi lahan tetap berjalan hingga sekarang.

Di dalam skenario pembangunan, untuk tetap mempertahankan produksi ekspor, pemerintah memiliki dua strategi. Pertama, pemerintah melakukan intensifikasi lahan di Jawa dan Sumatera dengan menggunakan varietas baru yang berumur lebih pendek, hasilnya berlimpah hingga adaptif terhadap perubahan iklim, termasuk kualitas tanah. Untuk tebu, pemerintah mengembangkan varietas tebu yang dapat ditanam di lahan kering, sehingga tidak mempengaruhi produksi berat di pihak lain. Penggunaan lahan kering itu ditawarkan kepada masyarakat karena daun tebu dapat digunakan sebagai pakan ternak. Persoalannya adalah kesediaan petani untuk menanam tebu. Bagi petani, usia panen tebu yang hampir setahun sangat tidak menguntungkan untuk memperoleh uang secara *cash*. Hal ini dibutuhkan strategi pendekatan yang luar biasa dari pemerintah dan pengelola pabrik gula terhadap petani.

Kedua, strateginya adalah membuka lahan baru di luar Jawa dan Sumatera sebagaimana dilakukan akhir pemerintahan Suharto dengan pencaangan “Sejuta hektar lahan gambut” di Kalimantan dan Sulawesi. Hal yang sama pada tanaman tebu. Sebagai konsekuensinya, ada sejumlah pabrik gula yang didirikan di luar Pulau Jawa dan Sumatera. Persoalannya, pembangunan tersebut mengalami hambatan, salah satunya karena jenis tanah tidak subur tanah di Pulau Jawa dan Sumatera. Pemerintah hanya bisa mendirikan 14 PG dan hanya 2 PG yang tidak aktif.

Sementara itu, untuk mencegah pengurangan lahan produktif, pemerintah

melakukan pengawasan ketat pengalih-fungsian lahan melalui peraturan-peraturan RTRW. Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah adalah hasil kajian pemerintah tentang peruntukkan lahan. Melalui Perda Kab. Sidoarjo No. 6 tahun 2009 telah menerbitkan peraturan daerah tentang RTRW yang membagi beberapa kawasan, termasuk di dalam kawasan perdesaan. Di dalam perda tersebut, alih fungsi lahan diatur dengan sangat ketat. Persoalannya, dalam tataran implementatif diberlakukan sangat ketat, meskipun pada kenyataannya tetap terjadi alih fungsi lahan. Hal ini terbukti dari peningkatan alih fungsi lahan di Kab. Sidoarjo dari tahun ke tahun. Sungguh memprihatinkan, dalam catatan sejarah, Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu wilayah produsen gula yang besar di Jawa pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda hingga awal pemerintahan Suharto. Hal itu terbukti dengan jumlah pabrik gula yang lebih banyak dibandingkan dengan 45 kabupaten/kota se-Jawa. Dari 14 PG, hanya tersisa 1 PG saja yang masih aktif, yaitu: PG Candi.

KESIMPULAN

Dari data, Kabupaten Sidoarjo awalnya bukan merupakan salah daerah yang secara khusus menjadi pusat pertanian atau perkebunan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Karesidenan Surabaya, termasuk kabupaten Sidoarjo menjadi pusat industri gula. Usaha produk gula sebenarnya telah diawali pada awal abad ke-10. Sebagai konsekuensinya, pertumbuhan pabrik Sidoarjo berkembang dengan pabrik-pabrik infrastruktur perkebunan. Pertumbuhan ini mengakibatkan percepatan alih fungsi lahan ke arah industri dan permukiman. Alih fungsi lahan dengan nyata telah mengakibatkan percepatan pengurangan luas lahan tanam tebu. Pengurangan luas lahan tanam tebu berakibat pada penurunan pasokan bahan baku tebu pada pabrik gula. Oleh karena itu, penutupan pabrik gula merupakan strategi paling efisien.

Dari temuan di lapangan, pemerintah dirasa perlu bersikap tegas dalam alih fungsi lahan.

Bagi pelaku bisnis, sikap tegas dalam penerapan Perda No. 9 tahun 2009 tentang RTRW. Hal ini menjadi semakin penting karena kecenderungan alih fungsi lahan dari hari ke hari semakin mengalami percepatan. Sementara itu, pabrik gula dituntut untuk melakukan diversifikasi produk sebagaimana dilakukan oleh salah satu pabrik di Mojokerto dengan menghasilkan bio-ethanol.

REFENSI

- [1] Statista Research Department, 'Production of sugar cane in Indonesia 2012-2021', 2022. <https://www.statista.com/statistics/706999/production-of-sugar-cane-in-indonesia/>
- [2] Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 'Rendahnya Produktivitas Tebu picu tingginya harga gula nasional', 2020. <http://ewscb.kemendag.go.id/berita/NewsDetail.aspx?v=8294>
- [3] Khungsri.com, 'Industry Outlook 2021-2023: Sugar Industry', 2021.
- [4] W. Winardi, Y. Karyono, and A. Nugroho, *Statistik Indonesia 2021*. Jakarta: BPS Indonesia, 2021.
- [5] W. Winardi, Y. Karyono, and A. Nugroho, *Statistik Indonesia 2022*. Jakarta: BPS Indonesia, 2022.
- [6] Y. Kuno, 'Oei Tiong Ham Concern: The First Business Empire of Southeast Asia', *Southeast Asian Stud.*, vol. 27, no. 2, pp. 137–152, 1989.
- [7] F. R. Moeis, T. Dartanto, J. P. Moeis, and M. Ikhsan, 'A longitudinal study of agriculture households in Indonesia: The effect of land and labor mobility on welfare and poverty dynamics', *World Dev. Perspect.*, vol. 20, p. 17, 2020, doi: <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2020.100261>.
- [8] Suhendra, 'Oei Tiong Ham, Si Raja Gula dari Semarang', *Tirto.id*, p. 3, Jul. 04, 2017.
- [9] Radar Jombang, 'Omah Kong, Saksi Bisu Gagahnya Suiker Fabriek Ponen', *Radar Jombang*, p. 6, Nov. 2020.
- [10] C. Amin, 'Jejak Bangunan Oei Tiong Ham di Kota Lama Semarang', *Sarga*, p. 8, 2020.
- [11] Mashuri and N. Nilofar, *Peran ibu dalam cerita Sarip Tambak Oso*. Surabaya: Pusat Bahasa, Balai Bahasa Surabaya, Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- [12] Pemerintah Provinsi Jawa Timur, *Peraturan Daerah No. 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031*, vol. 5. 2012.
- [13] M. C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia since c. 1200*, 4th ed. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2008.
- [14] J. L. van Zanden and D. Marks, 'An Economic History of Indonesia, 1800-2012', 2012.
- [15] S. Das, A. Mourmouras, and P. Rangazas, *Economic Growth and Development: A Dynamic Dual Economy Approach*. Cham: Springer International Publishing, 2018. doi: 10.1007/978-3-319-89755-4.
- [16] A. K. Dixit and V. D. Norman, *Theory of international trade: a dual, general equilibrium approach*. Welwyn : [Cambridge]: J. Nisbet ; Cambridge University Press, 1980.
- [17] F. R. Dobbin, 'The social construction of the Great Depression: Industrial policy during the 1930s in the United States, Britain, and France', *Theory Soc.*, vol. 22, no. 1, pp. 1–56, Feb. 1993, doi: 10.1007/BF00993447.
- [18] R. S. McElvaine, Ed., *Encyclopedia of The Great Depression. Vol 1*. New York: Macmillan Reference USA, 2004.
- [19] A. T. Aprilia, H. Irawan, and Y. Budi, 'Meninjau Praktik Kebijakan Tanam Paksa di Hindia Belanda 1830-1870', *Estoria J. Soc. Sci. Humanit.*, vol. 1, no. 2, pp. 119–134, Apr. 2021, doi: 10.30998/je.v1i1.465.
- [20] H. Kurniawan, 'Dampak Sistem Tanam Paksa terhadap Dinamika Perekonomian Petani Jawa 1830-1870', *Socia J. Ilmu-Ilmu Sos.*, vol. 11, no. 2, pp. 163–172, Sep. 2015, doi: 10.21831/socia.v11i2.5301.
- [21] E. Suhendar, *Ketimpangan Penguasaan Tanah di Jawa Barat*, 1st ed. Bandung: Yayasan Akatiga, 1995.
- [22] W. H. Puri and Sulastriono, 'Tanah Pekulen Dalam struktur hukum agraria di Jawa', *Mimb Huk*, vol. 28, no. 3, pp. 466–481, 2016.
- [23] N. A. Setiawati, *Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat. Pola Pemilikan, Penguasaan, dan Sengketa Tanah di Kota*

Yogyakarta setelah Reorganisasi. Sleman: STPN Press, 2011.

[24] H. K. Kwee, *The political economy of Java's northeast coast, c. 1740-1800: elite synergy*. Leiden ; Boston: Brill, 2006.

[25] P. D. Griggs, *Global industry, local innovation: the history of cane sugar production in Australia, 1820-1995*. Bern ; New York: Peter Lang, 2011.

[26] J. Curry-Machado and U. Bosma, 'Two Islands, One Commodity: Cuba, Java, and the Global Sugar Trade (1790-1930)', *New West Indian Guide Nieuwe West-Indische Gids*, vol. 86, no. 3-4, pp. 237-262, Jan. 2012, doi: 10.1163/13822373-90002415.

[27] U. Bosma, '4. The Global Detour of Cane Sugar: From Plantation Island to Sugarlandia', in *Colonialism, Institutional Change, and Shifts in Global Labour Relations*, K. Hofmeester and P. de Zwart, Eds. Amsterdam University Press, 2017, pp. 109-134. doi: 10.1515/9789048535026-005.

[28] D. R. Wulan and A. Trilaksana, 'Perkebunan Tebu Di Madiun Masa Belanda Tahun 1900-1930', *Avatara*, vol. 9, no. 1, p. 15, 2020.

[29] D. W. Fryer, 'Recovery of the Sugar Industry in Indonesia', *Econ. Geogr.*, vol. 33, no. 2, p. 171, Apr. 1957, doi: 10.2307/142442.

[30] C. Geertz, *Agricultural Involution. The Process of Ecological Change in Indonesia*. Barkeley: University of California Press, 1963. Accessed: Apr. 09, 2022. [Online]. Available: <https://www.jstor.org/stable/2173295?origin=crossref>

[31] M. N. Afandi, 'Analisis Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Di Jawa Barat', *J. Ilmu Adm.*, vol. 8, no. 2, p. 11, 2011.

[32] C. T. J. Basuki, J. Purwanto, R. U. Fajarningsih, and S. W. Ani, 'Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Sektor Non Pertanian Terhadap Ketersediaan Beras Di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah', *Caraka Tani J. Sustain. Agric.*, vol. 25, no. 1, p. 38, Mar. 2010, doi: 10.20961/carakatani.v25i1.15732.

[33] Z. Mustopa and P. B. Santosa, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Demak'. Universitas Diponegoro, 2011.

[Online].

Available:

<http://eprints.undip.ac.id/29151/1/artikel.pdf>

[34] R. Knight, 'The Visible Hand in *Tempo Doeloe*: The Culture of Management and the Organization of Business in Java's Colonial Sugar Industry', *J. Southeast Asian Stud.*, vol. 30, no. 1, pp. 74-98, Mar. 1999, doi: 10.1017/S0022463400008031.